

ARTIKEL

**SOSIALISASI SISTEM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN
AKURASI DATA WAJIB PAJAK**



**Oleh
Masythah Nur Ramdhani
C 201 19 450**

*Diajukan Sebagai Syarat Dalam Melaksanakan Penelitian Tugas Akhir Artikel Pada
Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tadulako*

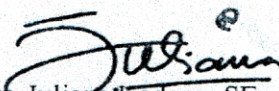
**PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TADULAKO
TAHUN
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN
ARTIKEL

***Sosialisasi Sistem Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam
Meningkatkan Efisiensi dan Akurasi Data Wajib Pajak***

Diajukan Oleh:
MASYTHAH NUR RAMDHANI
C 201 19 450

Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Juliana Kadang, SE., MM
NIP. 197507152006042001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
S1 Manajemen


Harnida Wahyuni Adda, SE, MA, PhD.,CHRP
NIP.19750319 200003 2 001

HALAMAN PENGESAHAN
ARTIKEL
SOSIALISAI PENGELOLAAN SISTEM PAJAK BUMI
BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN
AKURASI DATA WAJIB PAJAK

Diajukan oleh :

MASYTHAH NUR RAMDHANI
C 201 19 450

Diterima oleh Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako
sebagai salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Manajemen pada Program Studi S1 Manajemen
Pada Hari/Tanggal, Selasa 03 Juni

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tadulako



Prof. Wahyuningsih., S.E., M.Sc. Ph.D
NIP: 19721210 200604 2 002

Panitia Ujian Artikel :

Ketua : Dr. Juliana Kadang, SE., MM

Penguji Utama : Prof. Dr. Muslimin, SE., MM

Penguji Anggota : Suryadi Samudra, SE., MM

Tanda tangan

.....
.....
.....

LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)
Nomor: 05/Taroa.Vol.4.1/V/2025

Dengan ini kami sampaikan bahwa artikel yang berjudul:

**SOSIALISASI SISTEM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN AKURASI DATA WAJIB
PAJAK**

Disubmit oleh:

Nama : Masythah Nur Ramdhani, Juliana Kadang, Muslimin Dan
Suryadi

Afiliasi : Universitas Tadulako, Indonesia

Subjek : Pengabdian Masyarakat

Editor in chief Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat, telah memutuskan bahwa artikel tersebut telah diterima di Taroa, sementara proses review akan diterbitkan pada Volume 4, edisi 2, Juli 2025. Jurnal Taroa sedang dalam proses akreditasi secara nasional oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Demikian surat ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih telah mengirimkan artikel anda ke jurnal kami.

Taroa
Jurnal Pengabdian Masyarakat

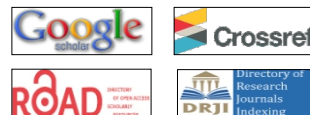
Chief Editor,


Umar

Nasional Index:



Internasional Index:



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan rasa syukur yang tak terhingga, penulis mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penyusunan artikel skripsi berjudul "Sosialisasi Sistem Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Akurasi Data Wajib Pajak" ini dapat terselesaikan, dan tentunya menjadi langkah penting dalam perjalanan pendidikan penulis selama menempuh tapak jejak belajar di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Tadulako. Perjalanan penulisan skripsi ini tak luput dari lika-liku dan rintangan yang menguji ketekunan dan kesabaran penulis. Namun, atas berkah-Nya dan dukungan berbagai pihak, artikel skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam proses penyusunan laporan ini, tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi penulis, namun berkat kerja keras serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya laporan ini dapat terselesaikan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan cinta kasih yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah ikhlas membantu proses penyelesaian laporan ini. Yaitu :

1. Allah SWT yang senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran kepada penulis selama menempuh Pendidikan sampai pada titik dimana penulis menyelesaikan artikel skripsi ini di bangku perkuliahan.
2. Kedua orang tua hebat penulis, papa tercinta bapak Laode Acshan. A dan mama terkasih ibu Sairah. Y. Moonty, dan segenap keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan serta nasihat mendalam dan menjadi motivasi hidup penulis sehingga penulis bisa terus melakukan seluruh kegiatan yang penulis ikuti selama masa perkuliahan.
3. Kepada kakak tercinta, kakak kebanggan yang penuh perhatian, Bripka Asri Wahyudin yang senantiasa memberi dukungan serta pengawasan dari jauh kepada penulis.
4. Kepada adik yang penuh rasa penyayang, adik bungsu harapan keluarga Muhammad Firza yang menjadi penyemangat serta pengusir rasa lelah dikala penulis sedang berada di fase yang hampir menyerah.
5. Ibu Harnida Wahyuni Adda. SE.MA.Ph.D selaku koordinator program studi S1 Manajemen yang telah berkenan membimbing mahasiswa/I yang mengikuti program MSIB Kelurahan Cinta Statistik 2024.
6. Kepada Pihak Kelurahan Tanamodindi sebagai tempat penulis mendapatkan pengalaman serta ilmu di bidang administrasi pemerintah.

7. Kepada saudari beda rahim, saudari seperjuangan penulis, Amna Ahmad Ali, yang senantiasa membantu, menemani, menyemangati, mengukir tawa bahagia dan mendukung penulis agar menyelesaikan skripsi secepat mungkin dengan bahasa penuh kesabaran layaknya saudara.
8. Kepada teman – teman akrab penulis, yakni Alif Ririn, Sapnatiar, Ary Sigit, Patrialis Akbar, Roy Irawan, Salsabila, Windi Safitri, dan Ayudita yang datang di waktu yang selalu tepat dalam menemani penulis dan membawa keceriaan.
9. dan kepada pihak – pihak yang tak bisa penulis sebut satu persatu.

DAFTAR ISI

Cover Judul Artikel	i
Halaman Persetujuan Artikel	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak.....	v
Abstract.....	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	viii
Pendahuluan	1
Metode	6
Hasil & Pembahasan	9
Pembahasan	15
Simpulan.....	17
Daftar Pustaka	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	7
Gambar 2.	9
Gambar 3.	10
Gambar 4.	10
Gambar 5.	11
Gambar 6.	11

Sosialisasi Sistem Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Akurasi Data Wajib Pajak

Masythah Nur Ramdhani¹, Juliana Kadang², Muslimin³, Suryadi Samudra⁴ Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako
ramdhanisitha@gmail.com

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan agar sistem yang digunakan pada proses pencatatan data pajak bumi bangunan lebih efisien dan meningkatkan akurasi data iuran pajak di kelurahan Tanamodindi, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sosialisasi direalisasikan dengan melakukan perencanaan bersama aparat kelurahan, dimulai dari diskusi yang membahas terkait kendala pada pengelolaan data iuran wajib pajak hingga dilaksanakannya proses pembinaan yang lebih mendalam soal proses penginputan data iuran wajib pajak dengan harapan dapat meminimalisir kekeliruan penginputan yang seringkali terjadi. Melalui sosialisasi ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman pada sistem pengelolaan dan akurasi data yang lebih mempermudah aparat kelurahan sesuai dengan pengklasifikasian wajib pajak. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam mewujudkan sistem tata kelola dengan data yang lebih akurat.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pajak Bumi Bangunan, Wajib Pajak

Abstract

This service aims to make the system used in the process of recording land and building tax data more efficient and increase the accuracy of tax contribution data in Tanamodindi Village, Palu City, Central Sulawesi. The socialization was realized by conducting joint planning with village officials, starting from discussions that discussed obstacles in managing taxpayer contribution data to implementing a more in-depth coaching process regarding the process of inputting taxpayer contribution data with the hope of minimizing input errors that often occur. Through this socialization, it is hoped that there will be an increase in understanding of the management system and data accuracy that will make it easier for village officials according to the classification of taxpayers. Thus, this article is expected to provide benefits to the government in realizing a governance system with more accurate data.

Keywords: Socialization, Land and Building Tax, Taxpayers

PENDAHULUAN

Kualitas perencanaan pembangunan sangat didukung oleh tersedianya data dan informasi mengenai sumber daya pendukung pembangunan, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya energi yang ada dan berbagai isu yang dapat dimasukkan dalam agenda pembangunan dan proses perencanaan secara strategis. Keputusan strategis yang dimaksud adalah strategi untuk memperbaiki keadaan atau menyesuaikan dengan kondisi kelembagaan melalui penciptaan peluang baru atau ide-ide inovatif (Zahara et al., 2023). Hal ini biasanya muncul dari penemuan faktor-faktor tertentu, termasuk juga adanya indikasi berupa tekanan, peluang, dan rasionalisasi, yang mempengaruhi pengambilan keputusan proses baik secara individu ataupun kelompok (Masdar et al., 2024). Proses pengambilan keputusan adalah salah satu tahap mempertimbangkan semua faktor dan meningkatkan koordinasi dengan semua entitas agar dapat meningkatkan kinerja (Muslimin et al., 2015). Instansi pemerintah harus dapat beroperasi secara fleksibel untuk memanfaatkan keuntungan dan memperluas cakupan efisiensinya (Zahra et al., 2021). Tidak hanya dikenal sebagai dasar untuk pembangunan yang stabil, tetapi juga merupakan sumber untuk menjaga sifat kompetitif dari suatu organisasi yang merupakan keuntungan bagi organisasi termasuk instansi pemerintah (Kornelius, 2023). Sinergisme akan tercermin melalui kemampuan lulusan dalam kecepatan menemukan solusi atas persoalan yang dihadapinya (Kornelius et al., 2024.).

Terkait pentingnya dengan sumber pendapatan negara, yaitu pajak, investasi asing, atau sumber pendapatan baru yang dapat timbul sebagai solusi atau bahkan ancaman jika tidak di maknai dengan baik (Seputra, 2020). Menjawab tantangan tersebut jika terjadi perubahan, sebuah lembaga tidak punya pilihan dan tetap bertahan kompetitif, seperti yang dijelaskan oleh (Harto et al., 2020) terkait manajemen pengetahuan yang berasumsi bahwa keunggulan kompetitif dapat didukung oleh kepemilikan *Intellectual Capital* seiring dengan perkembangan zaman. Kemungkinan kegagalan yang tinggi memberi ruang bagi seorang pemimpin dan

karyawan untuk memikirkan mekanisme yang sesuai dalam pengelolaan sebuah lembaga sehingga dapat menerapkan dan mengelola perubahan yang diinginkan (Adda et al., 2019). Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Poigi, 2024).

Terjaminnya pemerintahan yang baik dan berwibawa merupakan syarat era reformasi dalam mengemban tugas menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) merupakan alat administratif untuk memantau pelaksanaan kekuasaan pemerintahan berdasarkan hukum administrasi negara melalui lembaga formal dan informal (J. Sahetapy, 2022). *E-Government* dapat menjamin demokrasi yang inklusif. Tata kelola administratif berlangsung dalam bentuk sistem informasi pemerintahan (SIP) yang terhubung dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta, akademisi, sosial, pembangunan, dll, dan banyak pemangku kepentingan ikut terlibat dalam proses perencanaan sistem informasi tersebut (Seputra, 2020). *E-Government* dipandang sebagai salah satu alat yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, di sisi lain dengan penerapan tata kelola TI yang terdiri dari pemanfaatan informasi dan teknologi dapat meningkatkan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat, terjangkau, dan terukur. Salah satu implementasi *e-Government* adalah *e-procurement*. Hal ini diharapkan menjadi sistem yang dinilai lebih efisien dan terbuka untuk menyempurnakan sistem pengadaan manual (Samsudin & Muslihudin, 2018).

Setiap organisasi harus terus berinovasi agar tetap hidup dan berkembang dalam lingkungan yang dinamis dan semakin maju ini, termasuk organisasi nirlaba seperti pemerintah. Organisasi pemerintah dihadapkan pada sikap kritis masyarakat yang semakin meningkat, sehingga perilaku inovatif selalu diperlukan (Widasti & Mursid, 2022). Era yang dipengaruhi oleh berbagai hal yang menyebabkan terjadinya berbagai disrupti, yaitu *millennial storm* revolusi industri 4.0. Persepsi yang baik

akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan dukungan kepada pemerintah daerah sebagai aspek terpenting dari modal sosial termasuk dukungan dalam pembayaran pajak. Perihal pembiayaan kegiatan pembangunan nasional, menggali sumber dana dalam negeri adalah salah satu cara untuk mendapatkan dana contohnya dari tanggung jawab masyarakat seperti pajak, retribusi, dan lainnya yang didasari dengan undang-undang. Berdasarkan konteks legitimasi, birokrasi dapat merespon tuntutan akuntabilitas dan transparansi dengan memperoleh opini audit yang positif dan kemudian secara taktis meningkatkan kinerja penerimaan pajak daerah. Diharapkan pajak dan retribusi daerah yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah akan membantu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat (Afandi & Warjo, 2015).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Ini adalah pendapatan yang diperoleh dari pemungutan pajak kepada wajib pajak yang diatur secara hukum. Pajak Bumi dan Bangunan, yang didefinisikan sebagai pajak kebendaan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 adalah salah satu pajak yang termasuk dalam PAD. Artinya, besarnya tanggungan pajak tidak ditentukan oleh keadaan subjek (pelaku wajib pajak), tetapi oleh keadaan objek, yaitu tanah atau bangunan (Putri et al., 2022). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada wajib pajak atas properti dan bangunan yang ada di atasnya dengan yang nilai lebih besar daripada NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak). Untuk melakukan kegiatan pembangunan, pemerintah Indonesia tentu memerlukan dana. Salah satu cara untuk mendapatkan dana adalah melalui pungutan pajak (Hidayat & Wati, 2022).

Peningkatan pajak daerah dapat mendukung pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan daerah (Kahar et al., 2023). Penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memungutnya, sebagai Pendapatan Asli Daerah dan merupakan sumber dana bagi

pelaksanaan pembangunan di Daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dapat ditunjang oleh adanya kerja sama dari segenap aparatur pelaksana dan masyarakat dalam unsur yang strategis(Afandi & Warijo, 2015). Kebijakan dan strategi pemerintah yang dimaksudkan meliputi perencanaan sumber daya keuangan, pemberdayaan dan melibatkan pemangku kepentingan yang kolaboratif, dan memperkuat sistem tata kelola yang integratif mendukung pencapaian akuntabilitas di tingkat lokal(Furqan et al., 2023). Secara legitimitas, sistem pengelolaan pajak bumi bangunan pada kelurahan Tanamodindi yang telah disepakati sedari awal ialah menggunakan pencatatan manual dengan dua tahapan yaitu pencatatan pada lembar SPPT dan dilanjutkan dengan penginputan pada buku dengan format DHKP. Namun kedua tahapan ini dianggap terlalu menyita waktu karena dilakukan berulang namun tidak menjamin akurasi data yang dikelola.

Teknologi komputasi adalah suatu sistem yang terdiri dari orang, peralatan, analisis, evaluasi, dan penyebaran informasi untuk membantu pengambilan keputusan(Soerjono, 2023). Pemanfaatan teknologi pemerintah juga diterapkan di bidang pajak diantaranya website www.pajak.go.id sebagai tempat pengaduan pelayanan pajak kendaraan.

Perkembangan teknologi juga berdampak langsung kepada kegiatan administrasi kantor di lembaga pemerintahan, karena teknologi selalu berubah dan bahkan revolusioner, kantor harus terus beradaptasi dan menggunakannya. Pelayanan publik harus mampu memberikan pelayanan yang prima karena tuntutan dari masyarakat yang menginginkan pelayanan harus bisa secara cepat, efektif dan efisien(Wiranti & Frinaldi, 2023). Sebelum adanya kemajuan perangkat seperti komputer, sangat sulit bagi sebuah institusi untuk mengumpulkan data dan menyimpannya. Saat ini dengan begitu banyak dominasi penggunaan komputer, institut dan peneliti pun dapat membuktikan fungsi sesungguhnya dari perkembangan TI sampai saat ini(Pasaribu et al., 2021). Hadirnya teknologi internet dengan berbagai aplikasinya telah memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia karena pekerjaan yang lama itu tidak diperlukan lagi. Penyedia layanan online penting untuk

terus meningkatkan kualitas layanan online (*e-service quality*) yang mereka tawarkan sebagai penunjang kualitas yang diharapkan (Muzakir et al., 2021).

Pengelolaan administrasi pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran pembangunan dan pelayanan publik di tingkat kelurahan. Ketelitian dalam pencatatan serta pemutakhiran data PBB sangat menentukan validitas informasi dan efektivitas penarikan pajak. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kelurahan yang menghadapi tantangan dalam hal ini, salah satunya adalah Kelurahan Tanamodindi. Berdasarkan hasil observasi dan komunikasi awal dengan pihak kelurahan, diketahui bahwa pengelolaan data iuran PBB di Kelurahan Tanamodindi masih mengalami berbagai kendala. Salah satu permasalahan utamanya adalah kurangnya ketelitian dalam pencatatan data PBB, yang berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam penagihan serta pelaporan. Selain itu, meskipun telah tersedia sistem digital berbasis aplikasi untuk pengelolaan PBB, pemanfaatannya belum optimal karena minimnya pemahaman staf kelurahan terhadap sistem tersebut. Menanggapi permasalahan tersebut, Program Kelurahan Cinta Statistik (*Kelurahan Cantik*) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan terkait pengelolaan data iuran PBB secara digital. Kegiatan ini ditujukan kepada staf keuangan Kelurahan Tanamodindi sebagai mitra sasaran. Berdasarkan uraian di atas, artikel ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melakukan pencatatan dan pengelolaan PBB secara akurat dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital yang telah tersedia agar dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi data wajib pajak.

METODE

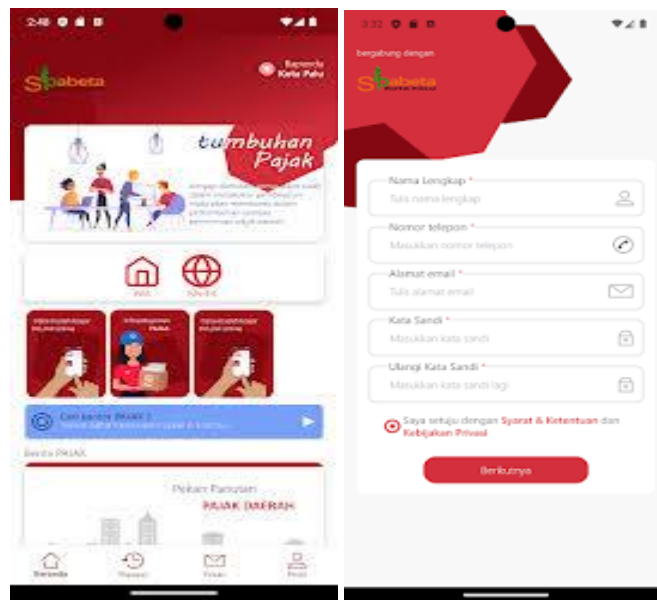
Proses realisasi pengelolaan data iuran pajak bumi bangunan ini dilaksanakan di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Sulawesi Tengah.

Pemberdayaan sumberdaya manusia merupakan salah satu upaya yang wajib dilakukan bagi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan manajemen (Lahandu et al., 2024). Adapun untuk pelaksanaan yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *participatory* dimana menurut (Junaedi, 2017) bahwa penelitian tindakan partisipatif merupakan bagian dari penelitian tindakan yang mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk tujuan mengambil tindakan dan membuat perubahan dengan menghasilkan pengetahuan praktis. Sehingga dengan demikian, Metode *Participatory Action Research* (PAR) adalah metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara tenaga administrasi dalam suatu komunitas dimana diberikan wawasan untuk mendorong terjadinya aksi – aksi transformatif. Untuk mengumpulkan data lapangan dan menganalisisnya, metode PAR dilaksanakan dengan beberapa tahapan sederhana salah satunya yaitu berbagi cerita (*sharing*), wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*)(Risnawati et al., 2022).

Adapun beberapa tahap yang sudah diterapkan terkait pengelolaan sistem iuran pajak bumi bangunan kelurahan Tanamodindi ialah, (1) Perancangan, (2) Pendefinisian, (3) Pengelolaan, (4) Pemutakhiran.

1. Perancangan

Pada tahap awal, dibutuhkan modulasi perencanaan yang menunjang alur pengelolaan berbasis aplikasi pada iuran pajak bumi bangunan dan dapat dipastikan bekerja sebagaimana fungsi yang diharapkan. Terkait aplikasi yang dimaksud, fasilitator bersama dengan pihak kelurahan memperoleh dukungan dari pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu yang mana telah meluncurkan aplikasi Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik Kota Palu (SIPABETA). Aplikasi tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat kota Palu dalam pengurusan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).



Gambar 1

Gambar 1 menunjukkan format tampilan aplikasi Sipabeta dalam proses data iuran wajib pajak PBB.

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari proses pengelolaan pajak bumi dan bangunan yang telah berjalan. Hal ini mencakup penerimaan data wajib pajak dari kecamatan hingga proses pelaporan. Langkah tersebut dilakukan untuk dapat mengumpulkan data secara komprehensif dan menghasilkan data yang relevan. Hal ini akan membantu dalam memahami permasalahan yang ada dan mencari solusi yang sesuai untuk pembangunan sistem informasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tanamodindi.

2. Pendefinisian

Tahap selanjutnya yaitu fasilitator mampu mengkonsepkan kegunaan digitalisasi aplikasi yang diterapkan pada pengelolaan pajak bumi bangunan kepada aparaturnya kelurahan tanamodindi sebagai penanggung jawab resmi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Prosedur ini mencakup alur koordinasi, pembagian tugas, serta mekanisme pemutakhiran data PBB yang melibatkan Bapenda, kecamatan, dan kelurahan.

3. Pengelolaan

Masuk pada bagian terpenting ialah tahapan pengelolaan data pada aplikasi tersebut yang tentu menjadi jantung informasi kepada elemen yang terhubung agar tidak terjadi kekeliruan data seperti pada pencatatan manual. Maka dari itu, dalam tahapan ini digunakan sistem berbasis aplikasi dalam pengelolaan data untuk menunjang pengelolaan data iuran pajak bumi bangunan di kelurahan Tanamodindi dengan tujuan untuk menyelaraskan data yang di catat secara manual sebagai arsip untuk kelurahan dan data yang di salin dalam bentuk ms. Excel. Pihak fasilitator melakukan rapat koordinasi untuk menyampaikan target, jadwal, dan teknis pemantauan kepada pihak kelurahan Tanamodindi. Data objek dan subjek pajak dikumpulkan melalui data historis SPPT yang sudah tercatat pada rentan waktu sebelumnya kemudian diolah melalui aplikasi Sipabeta dan didistribusikan ke masing-masing kecamatan lalu diverifikasi secara administratif di setiap kelurahan salah satunya ialah kelurahan Tanamodindi.

4. Pemutakhiran

Pada tahapan terakhir, data yang telah terinput dipastikan merupakan data yang valid, relevan dan dapat dia akses melalui aplikasi Sipabeta oleh institusi pemerintahan maupun masyarakat sipil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi Sistem Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi data wajib pajak memerlukan beberapa langkah yang disusun dengan baik. Proses ini dimulai dengan koordinasi awal dengan pihak kelurahan bagian seksi Keuangan, menyusun konsep kegiatan, dan mengumpulkan data melalui wawancara terkait kendala apa saja yang terjadi pada proses pengelolaan iuran pajak bumi dan bangunan. Setiap langkah memiliki tujuan khusus dan berfungsi untuk mencapai tujuan efisiensi pengelolaan data iuran wajib pajak.



Gambar 2

Gambar 2 menunjukkan proses koordinasi antara fasilitator kegiatan bersama Lurah dan Sekretaris Lurah Tanamodindi. Proses koordinasi ini sangat penting karena menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi dan menjadi langkah awal untuk melaksanakan kegiatan Sistem Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Akurasi Data Wajib Pajak. Koordinasi awal ini dimaksudkan untuk menyampaikan terkait rencana diadakannya sosialisasi dalam bentuk pendampingan dengan tujuan untuk meminimalisir beberapa kendala yang dialami pada proses pengelolaan dan penginputan data iuran wajib pajak bumi bangunan serta menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Dalam sistem pencatatan pajak bumi bangunan, masyarakat yang membayar pajak diberikan surat yang didalamnya memuat keterangan bersifat administratif, dan digunakan sebagai dasar pembayaran PBB oleh wajib pajak. Dalam sistem administrasi, surat ini disebut SPPT. SPPT adalah singkatan dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Ini adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh kantor pajak kepada wajib pajak sebagai pemberitahuan besarnya pajak terutang atas suatu objek pajak dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

PEMERINTAH KOTA PALU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
72.71.008.004.010.0047.0

SPPT PBB
SEKILAS
1823

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN
2025

NOP: 72.71.008.004.010.0047.0

LETAK OBJEK PAJAK
RT: 000 RW: 02 BLOK: -
TANAMODINDI
MONTIKULORE
KOTA PALU

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
EDY IDRIS
MOR. YAMIN NO. 18-
RT: 01 RW: 05
PAKLO UTARA
NIPWP: -

OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NJOP PER M ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI BANGUNAN	100 0	071 0	464.000 0	46.400.000 0

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = 46.400.000
 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0
 NJOP untuk penghitungan PBB = 46.400.000
 NJOP (Nilai Jual Kena Pajak) = 0.11% x 46.400.000 = 51.040
 PBB yang Terutang = 51.040

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)
 LIMA RULUH SATU RIBU EMPAT RULUH

TGL. JATUH TEMPO: 31 AGUSTUS 2025

TEMPAT PEMBAYARAN:
 BAPENDA, PT. 505, INDRAMARET

EDY IDRISARI, SE, AK, MM
 1875070120004220002

NAMA WP: EDY IDRIS
 Letak Objek Pajak: Kecamatan: MONTIKULORE
 Desa/Kelurahan: TANAMODINDI
 NOP: 72.71.008.004.010.0047.0
 SPPT Tahunan: 2025 - 019 51.040

Diterima tgl: _____
 Tanda Tangan: _____
 Nama Wajib Pajak: _____

Gambar 3

Gambar 3 menunjukkan format surat SPPT dari salah satu warga kelurahan tanamodindi. Di dalamnya tercakup detail identitas wajib pajak berupa letak dan objek pajak (tanah dan/atau bangunan), nilai jual objek pajak (NJOP), besarnya pajak terutang, tahun pajak yang dikenakan dan tanggal jatuh tempo pembayaran.



Gambar 4

Gambar 4. Pada tahap ini merupakan proses percobaan penginputan bersama staff seksi keuangan kelurahan Tanamodindi terkait data iuran pajak bumi bangunan. Adapun tahapan yang dilakukan yakni menginput data pembayaran wajib pajak dan dilaporkan kembali dengan jumlah pembayar wajib pajak di hari tersebut.



Gambar 5

Gambar 5 menunjukkan proses pengecekan data oleh fasilitator yang telah di input oleh staff seksi keuangan kelurahan Tanamodindi. Proses ini penting dilakukan untuk memastikan proses pengelolaan data iuran pajak bumi bangunan tidak keliru sebelum di cetak kembali dalam buku daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran (DHKP).

No. Urut	Nama Pemilik	Luas Bangunan	Luas Tanah	Nilai Pajak	Nilai Pembayaran	Status	Catatan
0001	...	...	...	...	...	...	...
0002	...	...	...	...	...	...	...
0003	...	...	...	...	...	...	...
0004	...	...	...	...	...	...	...
0005	...	...	...	...	...	...	...
0006	...	...	...	...	...	...	...
0007	...	...	...	...	...	...	...
0008	...	...	...	...	...	...	...
0009	...	...	...	...	...	...	...
0010	...	...	...	...	...	...	...
0011	...	...	...	...	...	...	...
0012	...	...	...	...	...	...	...
0013	...	...	...	...	...	...	...
0014	...	...	...	...	...	...	...
0015	...	...	...	...	...	...	...
0016	...	...	...	...	...	...	...
0017	...	...	...	...	...	...	...
0018	...	...	...	...	...	...	...
0019	...	...	...	...	...	...	...
0020	...	...	...	...	...	...	...
0021	...	...	...	...	...	...	...
0022	...	...	...	...	...	...	...
0023	...	...	...	...	...	...	...
0024	...	...	...	...	...	...	...
0025	...	...	...	...	...	...	...
0026	...	...	...	...	...	...	...
0027	...	...	...	...	...	...	...
0028	...	...	...	...	...	...	...
0029	...	...	...	...	...	...	...
0030	...	...	...	...	...	...	...
0031	...	...	...	...	...	...	...
0032	...	...	...	...	...	...	...
0033	...	...	...	...	...	...	...
0034	...	...	...	...	...	...	...
0035	...	...	...	...	...	...	...
0036	...	...	...	...	...	...	...
0037	...	...	...	...	...	...	...
0038	...	...	...	...	...	...	...
0039	...	...	...	...	...	...	...
0040	...	...	...	...	...	...	...
0041	...	...	...	...	...	...	...
0042	...	...	...	...	...	...	...
0043	...	...	...	...	...	...	...
0044	...	...	...	...	...	...	...
0045	...	...	...	...	...	...	...
0046	...	...	...	...	...	...	...
0047	...	...	...	...	...	...	...
0048	...	...	...	...	...	...	...
0049	...	...	...	...	...	...	...
0050	...	...	...	...	...	...	...
0051	...	...	...	...	...	...	...
0052	...	...	...	...	...	...	...
0053	...	...	...	...	...	...	...
0054	...	...	...	...	...	...	...
0055	...	...	...	...	...	...	...
0056	...	...	...	...	...	...	...
0057	...	...	...	...	...	...	...
0058	...	...	...	...	...	...	...
0059	...	...	...	...	...	...	...
0060	...	...	...	...	...	...	...
0061	...	...	...	...	...	...	...
0062	...	...	...	...	...	...	...
0063	...	...	...	...	...	...	...
0064	...	...	...	...	...	...	...
0065	...	...	...	...	...	...	...
0066	...	...	...	...	...	...	...
0067	...	...	...	...	...	...	...
0068	...	...	...	...	...	...	...
0069	...	...	...	...	...	...	...
0070	...	...	...	...	...	...	...
0071	...	...	...	...	...	...	...
0072	...	...	...	...	...	...	...
0073	...	...	...	...	...	...	...
0074	...	...	...	...	...	...	...
0075	...	...	...	...	...	...	...
0076	...	...	...	...	...	...	...
0077	...	...	...	...	...	...	...
0078	...	...	...	...	...	...	...
0079	...	...	...	...	...	...	...
0080	...	...	...	...	...	...	...
0081	...	...	...	...	...	...	...
0082	...	...	...	...	...	...	...
0083	...	...	...	...	...	...	...
0084	...	...	...	...	...	...	...
0085	...	...	...	...	...	...	...
0086	...	...	...	...	...	...	...
0087	...	...	...	...	...	...	...
0088	...	...	...	...	...	...	...
0089	...	...	...	...	...	...	...
0090	...	...	...	...	...	...	...
0091	...	...	...	...	...	...	...
0092	...	...	...	...	...	...	...
0093	...	...	...	...	...	...	...
0094	...	...	...	...	...	...	...
0095	...	...	...	...	...	...	...
0096	...	...	...	...	...	...	...
0097	...	...	...	...	...	...	...
0098	...	...	...	...	...	...	...
0099	...	...	...	...	...	...	...
0100	...	...	...	...	...	...	...

Gambar 6

Gambar 6 menunjukkan format buku DHKP dan rincian data di dalamnya yang

merupakan hasil penginputan dari bentuk format SPPT wajib pajak sebelumnya. Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran PBB adalah dokumen atau buku administrasi yang digunakan oleh pemerintah daerah, khususnya di bidang perpajakan. Beberapa fungsi dari pencacatan DHKP ini yaitu sebagai alat monitoring penerimaan PBB, dasar evaluasi kinerja pemungutan pajak dan juga di fungsikan sebagai arsip data perpajakan yang sah dan dapat digunakan dalam audit atau pemeriksaan.

Berikut ini adalah hasil terealisasinya tahapan – tahapan sosialisasi sistem pengelolaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi data wajib pajak di kelurahan Tanamodindi.

1. Perancangan

Proses perancangan sistem pengelolaan data ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan merencanakan bagian mendasar yang dilakukan untuk menunjang tahapan ini berjalan sebagaimana mestinya. Hasil yang diperoleh tergolong baik karena terlaksana sesuai dengan harapan dan tujuan yang dimaksud. Hal ini terlihat dari respon aparat kelurahan tanamodindi yang aktif bertukar pendapat terkait model yang menguraikan keunggulan serta kekurangan dari adanya sistem pengelolaan iuran pajak bumi bangunan jika dikelola baik secara manual ataupun secara pemograman berbasis aplikasi.

2. Pendefinisian

Dalam proses menyelaraskan konsep TI yang diterapkan pada sistematis pengelolaan aplikasi menggunakan Sipabeta merupakan tanggung jawab fasilitator. Aparat kelurahan tanamodindi dibimbing dalam segi pemahaman terkait sejauh mana penggunaan Sipabeta ini dapat memudahkan proses pengelolaan data iuran pajak bumi bangunan termaksud rangkaian penginputan nya mulai dari draft SPPT kemudian dibukukan menjadi DHKP dan juga terinput ke model aplikasi Sipabeta. Hasil yang diperoleh baik, aparat kelurahan tanamodindi terbilang aktif untuk mengemukakan pemahaman mereka dan seringkali menyoroti perbandingan antara

kesulitan mencatat manual yang lumayan menyita waktu dengan kecanggihan penerapan TI yang mempermudah dari segi perhitungan yang lebih akurat. Hal ini menandakan bahwa aparat kelurahan tanamodindi dikatakan paham dengan tujuan serta fungsi dari hadirnya aplikasi Sipabeta yang diharapkan dapat difungsikan secara efektif.

3. Pengelolaan

Pendampingan yang dilakukan dalam tahap pengelolaan sistem iuran pajak bumi bangunan diharapkan menjadi tombak perubahan sebagai solusi dari pemasalahan yang terjadi. Hasil dari sosialisasi pendampingan ini mampu mengatasi kesalahan dan kekeliruan pada model pengelolaan secara manual, aparat kelurahan tanamodindi melalui Seksi Keuangan sebagai pemegang wewenang dan tanggung jawab terkait iuran PBB masyarakat mengakui bahwa perolehan data jauh lebih akurat melalui perhitungan dari pengelolaan berbasis aplikasi menggunakan Sipabeta. Disamping data yang dihasilkan lebih akurat, pengelolaan segi perhitungan jumlah pembayaran iuran PBB dari masyarakat juga efisien dan lebih terminimalisir, serta alur koordinasi ke pihak kecamatan juga menjadi efektif karena aplikasi tersebut bisa di akses oleh institut pemerintahan sampai ke masyarakat sipil kota Palu.

4. Pemutakhiran

Data yang telah di input melalui Sipabeta diharapkan mampu menjadi sumber informasi iuran PBB kepada pihak kecamatan. Hasil dari pemutakhiran data sejauh ini dinilai baik. Tingkat keefektifan data telah dikatakan kredibel sehingga pihak lembaga kelurahan juga menyatakan bahwa pengelolaan data berbasis aplikasi sangat menunjang efisiensi data yang dikelola tidak hanya dalam internal kelurahan saja tetapi sampai pada elemen-elemen lain yang tersinkronisasi dalam alur koordinasi pengelolaan pajak tersebut. Pada tahapan terakhir, data yang telah terinput dipastikan merupakan data yang valid, relevan dan dapat dia akses oleh institusi pemerintahan.

Pada proses pelaksanaan sosialisasi, aparat kelurahan diberikan pemahaman terkait proses pengelolaan data yang dilakukan dalam 3 (tiga) langkah dengan skema sederhana yaitu SPPT – DHKP – SIPABETA. Proses pengelolaan data iuran PBB

dalam sistem digital kelurahan, khususnya melalui aplikasi **Sipabeta**, melibatkan serangkaian alur input data yang diawali dari dokumen manual dan berakhir pada sistem digital terintegrasi. Berikut penjabaran tiap tahapannya:

1. Melakukan proses penginputan data awal menggunakan draft SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang dilakukan oleh staf keuangan kelurahan yang diterima dari Bapenda atau pihak terkait. Kemudian melakukan verifikasi awal terhadap data identitas wajib pajak dan objek pajak. Selanjutnya data dikompilasi secara manual atau ke dalam format Excel sebagai tahap awal penginputan.
2. Data dari SPPT yang telah dikompilasi disusun menjadi draft DHKP. DHKP mencakup kode wilayah, nomor urut NOP, dan total ketetapan pajak per zona. Draft DHKP digunakan sebagai acuan untuk validasi massal terhadap seluruh SPPT yang masuk. Validasi bertujuan menghindari duplikasi data, kesalahan entri NOP, atau nilai PBB yang tidak sinkron.
3. Sistem model aplikasi Sipabeta berbasis digital, dikembangkan untuk memfasilitasi entri, monitoring, dan pelaporan data PBB di lingkungan kelurahan secara terintegrasi. Tahapan pertama untuk memulai akses diawali dengan login ke sistem SIPABETA menggunakan akun kelurahan. Masuk ke menu “Input SPPT”. Kolom input meliputi Nomor; Nama Wajib Pajak; Alamat; Luas tanah/bangunan; Nilai NJOP; dan Ketetapan PBB. Sistem secara otomatis melakukan validasi internal terhadap duplikasi NOP lalu penyesuaian tarif dan zona pajak selanjutnya pemetaan wilayah berbasis RT/RW atau blok tempat tinggal. Setelah input berhasil, sistem akan menampilkan daftar wajib pajak beserta status iurannya (Lunas/Belum Lunas), dan menyusun laporan rekapitulasi per wilayah.
4. Hasil input SIPABETA dapat digunakan untuk menyusun laporan bulanan realisasi penerimaan PBB, mendeteksi wilayah atau wajib pajak yang belum melunasi dan menyediakan data yang siap dikirim kembali ke Bapenda.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terlaksananya sosialisasi tersebut berdampak positif bagi kinerja aparat kelurahan Tanamodindi. Terlihat dari proses pengelolaan data yang cenderung mengalami kekeliruan dengan beberapa tahapan yaitu penginputan secara manual, kemudian penginputan pada ms.excel, terbukti dapat diminimalisir ketika menggunakan sistem aplikasi terintegritas yaitu Sipabeta. Berangkat dari adanya pendampingan yang konsisten, pendampingan ini berhasil memuat data yang selaras dengan data semestinya, lebih kredibel serta mengefisiensikan waktu penginputan tanpa mengalami kendala pada saat perhitungan data. Menurut (Astrini., 2021) Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan. Relevansi yang terkait pada sosialisasi yang dilakukan oleh fasilitator terhadap sistem pengelolaan data iuran wajib pajak memiliki tingkat keberhasilan yang di dukung oleh beberapa faktor, seperti :

1. Implementasi Kognitif

Melirik teori kognitif yang merupakan stimulus suatu objek fisik yang mempengaruhi seseorang dalam berbagai cara dan mampu menentukan perilaku seseorang. Teori kognitif yang dikemukakan oleh Greenwald (1968) dan Petty, Ostrom & Brack (1981) dalam Baron & Byrne (1991) memusatkan perhatiannya pada analisis respons kognitif, yaitu “Suatu usaha untuk memahami apa yang difikirkan orang sewaktu mereka dihadapkan pada stimulus persuasive, dan bagaimana fikiran serta proses kognitif menentukan apakah mereka mengalami perubahan sikap & sejauh mana perubahan itu terjadi” (Samsudin & Muslihudin, 2018). Sosialisasi pengelolaan pada sistem iuran wajib pajak yang dilakukan mengimplementasikan pendekatan secara kognitif dengan tujuan agar aparat dapat mengungkapkan kendala apa yang dialami selama proses menginput data iuran wajib pajak hingga solusi yang didapatkan untuk menetralsir kendala yang ada.

2. Pengadaan sarana & prasarana yang menunjang

Dalam tahap sosialisasi yang dilaksanakan, diperlukan adanya fasilitas yang menunjang salah satunya adalah teknologi komputer dan jaringan. Keduanya merupakan media yang sangat penting karena merupakan bagian utama dalam proses pengelolaan data agar lebih efisien.

3. Penerapan materi bersifat kontemplatif

Kontemplatif merupakan sebuah metode yang memungkinkan manusia untuk merenung dan menggunakan kemampuan berpikir yang dimiliki dalam proses pengamatan dan penafsiran sebuah objek. Faktor tersebut menyebabkan kemampuan berpikir dan adaptasi dari setiap individu berbeda dan dapat berpengaruh terhadap proses penyerapan informasi (Kemalasari et al, 2021). Hal ini juga sangat dibutuhkan dalam proses sosialisasi yang dilaksanakan, mengingat modul pembahasan yang diterapkan terkait proses pengelolaan data iuran wajib pajak akan terus diterapkan jangka panjang agar data tersebut akurat dan efisien.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan yang dilakukan, sejalan dengan proses pengelolaan menggunakan aplikasi Sipabeta maka dapat dinyatakan bahwa pengelolaan pajak bumi bangunan dilakukan dengan 3 tahapan di kelurahan Tanamodindi. Dilihat dari segi penginputan sudah berjalan dengan baik karena semua persyaratan perpajakan di input ke dalam sistem yang bisa diakses secara online hanya dengan satu aplikasi. Berkenaan dengan waktu dalam menginput persyaratan pemungutan pajak sudah sesuai dengan perencanaan SOP. Hasil ini mengacu pada proses sosialisasi dan pendampingan yang mengimplementasikan model aplikasi Sipabeta ke dalam sistem pengelolaan iuran pajak bumi bangunan dan hal tersebut telah diterapkan di kelurahan Tanamodindi karena dinilai sangat membantu guna mengefisienkan proses pengelolaan, sinkronisasi data terbaru serta mengurangi angka kekeliruan data yang terjadi.

Sosialisasi dalam bentuk pendampingan yang dilakukan berjalan lancar.

Aparat kelurahan terbantu dengan adanya tahap pembinaan terkait pengelolaan data iuran wajib pajak. Keaktifan staf kelurahan yang menjadi partisipan dalam sosialisasi tersebut juga dapat terlihat dari cara diskusi yang komprehensif serta terfokus pada matriks pelaksanaan yang mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Adda, H. W., Natsir, S., & Rossanty, N. P. E. (2019). Employee perceptions towards organizational change and leadership in the banking industry. *Banks and Bank Systems*, 14(3), 113–120. [https://doi.org/10.21511/bbs.14\(3\).2019.10](https://doi.org/10.21511/bbs.14(3).2019.10)
- Afandi, M. I., & Warijo. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 92–113.
- Furqan, A. C., Kahar, A., Masdar, R., Andriana, C., Rahmadiyah, F., & Risma, R. (2023). Mechanism of incentives and accountability in rural institutions: Regional context in global dimensions of SDGS. *Cogent Economics and Finance*, 11(2). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2259274>
- Harto, P., Susanto, H., Zainuddin, F., Ghozali, I., & Rosita, R. (2020). Intellectual Capital and Financial Performance of State-Owned Banking: Evidence From Indonesia. *International Journal of Learning and Intellectual Capital*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.1504/ijlic.2020.10023752>
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- Informasi, T., & Soerjono, H. (2023). Jurnal Pemanfaatan Manajemen Teknologi Informasi Untuk Strategi dan Perencanaan Utilization of Information Technology Management for Strategy and Planning. 5, 300–306.
- J. Sahetapy, A. (2022). Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik dan Berwibawa (Good

and Clean Governance). *Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora (Jssh)*, 2(2), 82–88.
<https://doi.org/10.52046/jssh.v2i2.1588>

Journal, C. D., Kornelius, Y., Chintya, P., Buntuang, D., & Rombe, E. (n.d.).
 SOSIALISASI TENTANG PENTINGNYA COACHING PROGRAM. X.

Junaedi, F. (2017). Participatory Action Research, Metode Riset untuk Analisis Sosial
 Partisipatif. *Komunikator*, 1944, 1–4.

Kahar, A., Chairil, A., & Tenripada, T. (2023). EMPIRIS DARI DAERAH DI
 INDONESIA. 19, 289–298.

Kornelius, Y. (2023). Sosialisasi manajemen pengetahuan bagi pelaku usaha mikro.
 4(2), 3455–3459.

Lahandu, A. F. J., Indriani, A., Chintya, P., Buntuang, D., Studi, P., Manajemen, S.,
 Ekonomi, F., & Tadulako, U. (2024). Pemberdayaan SDM Melalui Produksi Bara
 Charcoal (BRIKET). 4(1), 621– 626.

Masdar, R., Din, M., Pattawe, A., Iqbal, M., & Mappanyuki, A. (2024). The effect of
 decision making related rationalization on fraud and the mediating role of
 psychosocial work environment. *Decision Science Letters*, 13(1), 111–118.
<https://doi.org/10.5267/j.dsl.2023.11.004>

Muslimin, Hadi, S., & Ardiansyah. (2015). The relationship between logistics and
 financial performance of smes in Indonesia. *International Journal of Applied Business
 and Economic Research*, 13(7), 4805–4814.

Muzakir, Bachri, S., Adam, R. P., & Wahyuningsih. (2021). The analysis of forming
 dimensions of e- service quality for online travel services. *International Journal of
 Data and Network Science*, 5(3), 239–244. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2021.6.010>

Pasaribu, F., Bulan, T. R. N., Muzakir, & Pratama, K. (2021). Impact of strategic
 leadership and organizational innovation on the strategic management: Mediatonal
 role of it capability. *Polish Journal of Management Studies*, 24(2), 354–369.
<https://doi.org/10.17512/pjms.2021.24.2.22>

Poigi, H. I. (2024). Sosialisasi Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Persiapan
 Tompotika Di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. 4(4), 213–224.

Putri, M. A., Rahaningsih, N., Basysyar, F. M., & Nurdiawan, O. (2022). Penerapan Data Mining Menggunakan Metode Clustering Untuk Mengetahui Kelompok Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Accounting Information System (AIMS)*, 5(2), 145–156.

Risnawati, R., Wirastuti, W., Natsir, S., Rosanty, N. P. E., Fadjar, A., Munawarah, M., & Fera, F. (2022). Adaptasi Dan Kolaborasi Menuju Koperasi Inovatif Kota Palu. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 4(4), 698–707. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i4.927>

Samsudin, I., & Muslihudin, M. (2018). Implementasi Web Government Dalam Meningkatkan Potensi Produk Unggulan Desa Berbasis Android. *Jurnal Teknologi Komputer Dan Sistem Informasi*, 1(2), 10–16.

Seputra, N. K. S. K. A. (2020). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 12(1), 60–69.

Widasti, R., & Mursid, A. (2022). Pengaruh Pembelajaran Organisasi dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Perilaku Kerja Inovatif Pegawai Dengan Work Engagement Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal). *Magisma*, 10(1), 107–123.

Wiranti, N. E., & Frinaldi, A. (2023). Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik dengan Teknologi di Era Digital. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 748–754.

Zahara, Z., Ikhsan, Santi, I. N., & Farid. (2023). Entrepreneurial marketing and marketing performance through digital marketing capabilities of SMEs in post-pandemic recovery. *Cogent Business and Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2204592>

Zahra, F., Abdullah, M. I., Din, M., Thahir, H., Harun, H., & Ali, J. K. (2021). The role of e-purchasing in government procurement fraud reduction through expanding market access. *International Journal of Data and Network Science*, 6(1),

179–184. <https://doi.org/10.5267/J.IJDNS.2021.9.010>